

## **TINDAK LANJUT ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR MELALUI PROSES PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PADA PT XYZ**

**Nengah Suke Asih<sup>1</sup>, Dian Nirmala Dewi<sup>2</sup>, Irawan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> mahasiswa, <sup>2</sup> pembimbing 1, <sup>3</sup> pembimbing 2  
Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung  
Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Rajabasa, Bandar Lampung,  
Lampung, Indonesia  
Email: nengahsukeasih97@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar melalui proses pengurangan sanksi administrasi pada PT XYZ. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam tugas akhir ini diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan berupa surat ketetapan pajak dan bukti pendukung lainnya, sedangkan pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. PT XYZ menerima SKPKB pada tahun 2017 untuk masa pajak Februari sampai dengan November sebesar Rp57.236.360,-. Pada tahun yang sama, PT XYZ menerima SKPLB untuk masa pajak Desember sebesar Rp57.236.360,-. SKPLB yang diterbitkan merupakan program pemerintah dalam meringankan pembayaran PPN terutang. Setelah PT XYZ berkonsultasi dengan KKP DP, langkah yang pertama dilakukan adalah membayar pokok PPN terutang yang tertera pada SKPKB senilai Rp57.236.360,-. Pembayaran PPN terutang dibayar pada tanggal 13 September 2018 dan tanggal tersebut telah melewati jangka waktu satu tahun pajak, maka PT XYZ dikenakan sanksi administrasi kenaikan pasal 13 ayat 3 yang artinya sanksi administrasi dikenakan 100% dari nilai PPN terutang. Setelah melakukan pembayaran, PT XYZ mengajukan surat permohonan pengurangan sanksi administrasi yang semula Rp57.236.360,- menjadi Rp0,- dan surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 11 April 2019 berisi mengenai sanksi administrasi disetujui untuk dikurangkan senilai Rp14.309.090,-. Sanksi administrasi yang tersisa senilai Rp42.927.270,- akan dibayar dengan sistem angsuran selama 10 bulan. PT XYZ mengajukan surat pernyataan pembayaran sanksi administrasi secara angsuran ke kantor pelayanan pajak dimulai dari bulan Mei 2019 hingga Februari 2020.

**Kata Kunci:** *Sanksi Administrasi, Surat Ketetapan Pajak.*

## PENDAHULUAN

Pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP, merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan memiliki sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Muljono, 2008). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Setiap kali ada pemungutan PPN akan selalu ada faktur pajak yang diterbitkan.

PT XYZ merupakan PKP yang bergerak di bidang konstruksi. Pekerjaan dalam bidang ini memerlukan alat-alat berat dan persediaan BBM yang mencukupi. PT XYZ sering melakukan transaksi pembelian BBM di PT A, yang merupakan PKP yang bergerak di bidang niaga BBM. Pada tahun 2016 PT XYZ melakukan pembelian dan mendapatkan faktur pajak yang dapat dikreditkan untuk masa pajak yang berlaku. Pada tahun 2017 diterbitkan SKPKB untuk masa pajak Februari sampai dengan November 2016 dan SKPLB untuk masa pajak Desember 2016. PT XYZ melakukan konsultasi dengan Kantor Konsultan Pajak Damanique *and Partner* (KKP DP) mengenai langkah-langkah yang ahrus dilakukan, kemudian saran yang diberikan oleh KKP DP untuk

berpedoman dengan peraturan menteri keuangan No 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Tugas akhir ini bertujuan untuk membahas tahapan penyelesaian SKPKB oleh PT XYZ yang diberi judul **“Tindak Lanjut Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Melalui Proses Pengurangan Sanksi Administrasi Pada PT XYZ”**.

## METODE PELAKSANAAN

Bahan yang digunakan berupa data informasi tahapan penyelesaian SKPKB dan dokumen-dokumen lainnya sebagai bukti pendukung.

Data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan manajer KKP DP terkait tindak lanjut SKPKB. Data sekunder yang diperoleh berupa surat ketetapan pajak dan bukti lainnya.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan

menghasilkan data berupa kata-kata atau lisan orang-orang dari pelaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2016). Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, notulen rapat dan sebagainya (Arikunto, 2014). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang (Mardalis, 2002).

Tahapan dalam penyusunan tugas akhir yang dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir yang diperoleh dari hasil wawancara.
2. Mendeskripsikan prosedur penyelesaian SKPKB pada PT XYZ.
3. Menarik kesimpulan dari hasil deskripsi mengenai tindak lanjut atas SKPKB.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada tahun 2016 PT XYZ melakukan transaksi pembelian pada PT A dan PT A telah memungut PPN atas transaksi pembelian tersebut. Munculnya SKPKB yang diterima oleh PT XYZ adalah SPT masa PPN yang wajib disampaikan oleh PT A tidak

pemerintah. Dampaknya, PT XYZ menerima SKPKB yang harus dibayar tepat waktu dengan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018. Pada tahun 2017, PT XYZ menerima SKPLB untuk masa pajak Desember 2016 yang merupakan bantuan pemerintah untuk melunasi PPN terutang. SKPLB tersebut kemudian direstitusikan dan PT XYZ melakukan pembayaran PPN terutang tersebut pada bulan September 2018. Pembayaran yang dilakukan telah melebihi dari satu tahun pajak, maka PT XYZ menerima sanksi administrasi kenaikan pasal 13 ayat 3. Pasal tersebut merupakan sanksi administrasi yang dikenakan 100% dari PPN terutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer KKP DP, diperoleh informasi mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh PT XYZ berkaitan dengan SKPKB dengan berpedoman PMK nomor 8. Adapun tahapan tindak lanjut yang dilakukan PT XYZ sebagai berikut:

1. Membayar pokok PPN terutang yang tertera pada SKPKB. PPN terutang pada SKPKB dibayar pada bulan September 2018 senilai Rp57.236.360,-. PT XYZ

administrasi kenaikan pasal 13 ayat 3 yang dapat disimpulkan, PT XYZ dikenai sanksi administrasi 100% dari pokok PPN terutang. Sanksi administrasi PT XYZ sebesar Rp57.236.360,-.

2. PT XYZ mengirimkan surat permohonan pengurangan sanksi administrasi agar sanksi administrasi senilai Rp57.236.360,- dapat dijadikan Rp0,-. Permohonan tersebut diajukan pada bulan Desember 2018. Setelah menunggu beberapa bulan, DJP membalas surat yang diajukan. Surat balasan tersebut berupa surat keputusan dari DJP bahwa sanksi administrasi dikabulkan Rp14.309.090 atau 25% dari nilai pengajuan.
3. Mengajukan surat pernyataan pembayaran sanksi administrasi secara angsuran. Sisa sanksi administrasi senilai Rp42.927.270,- harus dibayar oleh PT XYZ. Pembayaran yang dilakukan yaitu dengan cara angsuran selama 10 bulan dimulai dari bulan Mei 2019 hingga Februari 2020.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, tahapan penyelesaian SKPKB pada PT XYZ dapat disimpulkan:

1. Membayar pokok PPN terutang
2. Mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
3. Mengajukan surat pernyataan pembayaran sanksi administrasi secara angsuran.

## **REFERENSI**

- Arikunto, Suharsim. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Mardalis. 2002. *Metode Penelitian*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang*. Andi. Yogyakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung

The screenshot shows a plagiarism checker interface. At the top, a purple header displays the document name 'nengah suke asih.docx' and '1 minute ago'. Below this, a white box shows a '15%' risk of plagiarism, labeled 'MEDIUM'. A breakdown of the risk includes 'Paraphrase' at 2%, 'Improper Citations' at 0%, and 'Concentration' with three stars. A list of actions is provided: 'Share', 'Deep' (with a warning icon and a '\$ 1.00' price tag), 'Review', 'Proofread' (with 'AB' and a checkmark icon), and 'Remove plagiarism'. At the bottom, a green button for 'View report' is shown with a '\$ 1.80' price tag.

nengah suke asih.docx  
1 minute ago

15% Risk of the plagiarism  
**MEDIUM**

Paraphrase 2%  
Improper Citations 0%  
Concentration ★★

Share

Deep ! \$ 1.00

Review >

AB ✓ Proofread >

Remove plagiarism >

View report \$ 1.80